

BAB I

PENDAHULUAN

A. Dasar Pemikiran

Sejarah lahir, tumbuh dan berkembangnya Indonesia menjadi sebuah bangsa, Islam sebagai salah satu entitas yang ada di Indonesia memegang peranan penting. Islam sebagai sebuah entitas tidak hanya memegang peranan sebagai agama mayoritas penduduk Indonesia yang mengatur ritus peribadatan semata tetapi juga menjadi sebuah ideologi perjuangan ataupun ruh perjuangan sebagian penganutnya di Indonesia. Hal ini menjadikan Islam sebagai sebuah teologi pembebasan di Indonesia.

Sejarah mencatat keberhasilan Kerajaan Demak mengusir Portugis di Sunda Kelapa tahun 1527 dan Kerajaan Ternate yang berhasil mengusir Portugis tahun 1577. Selanjutnya pada masa penjajahan Belanda yang harus menghadapi Perang Paderi (1821-1832), Perang Jawa (1825-1830) hingga Perang Aceh (1873-1904) Perjuangan tersebut walaupun bersifat politis tetapi tidak dapat dipungkiri ada ruh semangat keislaman yang digelorakan oleh para pemimpinnya dalam menghadapi penjajahan bangsa-bangsa Eropa tersebut.

Kemudian pada masa Pergerakan Nasional muncul organisasi berasaskan Islam yaitu Sarekat Dagang Islam (SDI) pada tahun 1911. Sarekat Dagang Islam pada tahun 1912 bermetamorfosis menjadi Sarekat Islam (SI). Sarekat Islam sendiri tercatat sebagai organisasi terbesar pertama di Indonesia dengan anggota terbanyak yang organisasinya tersebar hingga keluar Pulau Jawa sampai menjadi Partai Sarekat Islam

Indonesia (PSII). Pada masa Pergerakan Nasional tidak hanya Sarekat Islam tetapi juga muncul beberapa organisasi keislaman berbasis sosial kemasyarakatan diantaranya adalah Muhammadiyah dan Nahdatul Ulama (NU). Kemudian organisasi-organisasi keislaman ini membentuk sebuah wadah koordinasi dan komunikasi bersama yaitu Majelis Islam A'la Indonesia (MIAI). Kesadaran spiritualitas keislaman ini juga menjalar ke dalam jiwa para pemuda hingga melahirkan organisasi pemuda yang diberi nama *Jong Islamieten Bond* (JIB). Selain itu muncul organisasi politik berasaskan Islam diantaranya adalah Partai Sarekat Islam Indonesia (PSII) dan Partai Islam Indonesia (PII).

Bahkan pada masa pendudukan Jepang pun yang melarang berdirinya organisasi-organisasi politik, sehingga banyak organisasi-organisasi pada masa Pergerakan Nasional yang bubar bahkan dibubarkan, Islam masih memegang peranan. Peranan Islam pada masa Pendudukan Jepang ini dapat terlihat dari tetap diizinkan MIAI sebagai satu-satunya organisasi pada masa Pergerakan Nasional yang boleh berdiri oleh Jepang. Majelis Islam A'la Indonesia kemudian berubah menjadi Majelis Syura Muslimin Indonesia (Masyumi) tahun 1943. Masyumi sendiri memiliki pasukan paramiliter yaitu Hizbullah dan Sabilillah. Keberadaan Masyumi pada awalnya dimanfaatkan untuk kepentingan Jepang dalam menarik simpati umat Islam di Indonesia tetapi dalam perkembangannya Masyumi digunakan oleh para pemimpinnya untuk membangun kesadaran masyarakat muslim di Indonesia.

Pada tanggal 9 April 1945 pemerintah pendudukan Jepang membentuk *Dokuritsu Junbi Cosakai* atau Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia

(BPUPKI). Para pemimpin Islam ketika itu berupaya untuk mempertegas keberadaan Islam dari entitas masyarakat Indonesia menjadi sebuah entitas negara. Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia sendiri berdiri sebagai bentuk realisasi awal dari janji Jepang untuk memberikan kemerdekaan kepada Indonesia yang disampaikan oleh Perdana Menteri Koiso pada tanggal 7 September 1944. Usaha untuk menjadikan Islam sebagai entitas negara mulai dilakukan setelah pada tanggal 20 Mei – 1 Juni 1945, BPUPKI berhasil mengadakan sidang pertama yang menghasilkan rumusan dasar negara yang dinamakan Pancasila. Kemudian rumusan dasar negara ini dibentuk menjadi satu dokumen pada tanggal 22 Juni 1945 oleh panitia kecil yang terdiri dari sembilan orang yaitu Soekarno, Mohammad Hatta, A.A.Maramis, Abikoesno Tjokrosoejoso, Abdul Kahar Mudzakir, Agus Salim, Ahmad Soebarjo, Wahid Hasyim dan Mohammad Yamin. Dokumen yang disusun oleh Panitia Kecil ini dikenal dengan nama Piagam Jakarta yang berisi:

“Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan, karena tidak sesuai dengan peri-kemanusiaan dan peri-keadilan”.

“Dan perjuangannya pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentausa mengantarkan Rakyat Indonesia kedepan pintu-gerbang Negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur”.

“Atas berkat rahmat Allah Yang Maha Kuasa, dan dengan didorongkan oleh keinginan-luhur, supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menjatakan dengan ini kemerdekaannya”.

Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia Merdeka yang melindungi segenap Bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesedjahteraan umum, mentjerdaskan kehidupan Bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Hukum Dasar Negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan Rakyat, dengan berdasar kepada: ke-Tuhanan dengan kewajiban

mendjalankan Sjari'at Islam bagi pemeluk-pemeluknja, menurut dasar kemanusiaan jang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan Kerakjatan jang dipimpin oleh hikmat-kebidjaksanaan dalam permusjawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh Rakjat Indonesia”.¹

Di dalam perkembangannya, Islam sebagai entitas negara tersebut tidak berumur panjang bahkan tidak mendapatkan legalitasnya. Di dalam sidang PPKI tanggal 18 Agustus 1945, satu hari setelah Indonesia merdeka. PPKI berhasil menetapkan UUD 1945, hasil rumusan Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI), dengan adanya penghapusan tujuh kata dalam dokumen Piagam Jakarta tentang Pancasila yaitu “dengan kewajiban menjalankan syari'at Islam bagi pemeluk-pemeluknya”. Penghapusan tujuh kata dalam Piagam Jakarta ini tidak bisa diterima oleh para pemimpin Islam, salah satunya adalah Prawoto Mangkusasmito. Prawoto mempertanyakan dasar penghapusan ini yaitu:

“Apa sebab rumus “Piagam Djakarta”, jang diperdapat dengan susah pajah, dengan memeras otak dan tenaga berhari-hari oleh tokoh-tokoh terkemuka bangsa kita, kemudian didalam rapat “Panitya Persiapan Kemerdekaan” pada tanggal 18 Agustus 1945 didalam beberapa menit sadja dapat diubah? Apa, apa, apa sebabnja?”²

Bahkan Prawoto merasa heran dengan sikap Soekarno yang terkesan mendua. Ketika sidang BPUPKI, Soekarno berusaha mempertahankan Piagam Jakarta. Tetapi dalam sidang PPKI, Soekarno justru mempelopori usaha untuk mengubah isi Piagam Jakarta.³ Dalam rapat pleno BPUPKI pada tanggal 14 Juli 1945, yang pada akhirnya

¹ S.U.Bajasut. *Alam Fikiran dan Djejak Perdjungan Prawoto Mangkusasmito*. (Surabaya: Documenta, 1972), hal 304

² *Ibid.*, hal 306

³ Perubahan isi Piagam Jakarta yang menjadi Pembukaan UUD 1945 menurut Mohammad Hatta dalam bukunya “Memoir” diawali dengan adanya telepon dari Nishijama, pembantu Laksamana Maeda yang mengabarkan bahwa ada opsir Kaigun (Angkatan Laut Jepang) yang berkuasa di Indonesia bagian Timur ingin menyampaikan bahwa adanya keberatan dari masyarakat Indonesia

diterima dengan aklamasi oleh BPUPKI, Soekarno berusaha mempertahankan Piagam Jakarta dengan mengatakan:

“Paduka Tuan Ketua, Kami Panitia Perantjang mengetahui bahwa anggota jang terhormat Sanusi minta perkataan “bagi pemeluk-pemeluknja” ditjoret. Sekarang ternjata, bahwa anggota terhormat Hadikusumo minta djuga ditjoretnja. Tetapi kami berpendapat, bahwa kalimat-kalimat ini seluruhnja berdasar kepada ke-Tuhanan, sudahlah hasil kompromis diantara 2 pihak. Sehingga dengan adanja kompromis itu, perselisihan diantara kedua belah pihak hilang. Tiap kompromis berdasar kepada memberi dan mengambil, geven dan nemen. Ini suatu kompromis jang berdasar memberi dan mengambil. Bahkan kemaren didalam Panitia soal ini ditindjau lagi dengan sedalam-dalamnja diantara lain-lain, sebagai tuan-tuan jang terhormat mengetahui, dengan Tuan Wachid Hasjim dan Agus Salim diantara anggota panitia, kedua-duanja pemuka Islam. Pendek kata ini kompromis jang sebaik-baiknya. Djadi Panitia memegang teguh akan kompromis jang dinamakan oleh anggota jang terhormat Mohd. Yamin “Djakarta Charter”, jang disertai perkataan tuan anggota jang terhormat Sukiman, gentlemen agreement, supaya ini dipegang teguh diantara pihak Islam dan kebangsaan. Saja mengharap paduka tuan jang jang mulia, rapat besar suka membenarkan panitia itu.”⁴

Bahkan Prawoto mengutip pernyataan Muhammad Yamin dalam pendahuluan bukunya “*Naskah persiapan Undang-Undang Dasar 1945*” yaitu:

“Dokumen Politik bertanggal 22 Djuni 1945 jang dalam sedjarah akan bernama Piagam Djakarta, ditanda-tangani oleh 9 pengandjur, terbukti mempunjai daja-penarik dapat mempersatukan gagasan ketata-negaraan dengan tekad-bulat atas persatuan nasional menjongsong datangnya negara Indonesia jang merdeka berdaulat”.⁵

Prawoto sendiri, merujuk kepada ahli bahasa, menganggap bahwa Pancasila bukan sekedar dasar negara tetapi juga merupakan tuntutan akhlak. Istilah Pancasila sendiri aslinya lahir di India sebagai ciptaan Sidharta Gautama. Ketika agama Budha

bagian Timur terhadap bagian kalimat dalam Pembukaan UUD 1945, yang berbunyi “Ketuhanan dengan Kewajiban Menjalankan Syari’at Islam bagi pemeluk-pemeluknya”. Menurut mereka hal ini merupakan bentuk diskriminasi terhadap golongan minoritas dan mereka mengancam jika kalimat tersebut ditetapkan juga, mereka lebih suka berdiri di luar Republik Indonesia. Lihat Mohammad Hatta. *Memoir*. (Jakarta: Yayasan Hatta, 2002), hal 458

⁴ *Ibid.*, hal 305

⁵ *Ibid.*, hal 303

masuk ke Indonesia, kemudian dikenal kata Pancasila yang artinya lima prinsip atau aturan tingkah laku. Aturan tingkah laku ini sendiri terdapat dalam kitab suci Tripitaka yaitu Vinaya Pitaka. Bahkan pada masa Raja Ashoka, Pancasila dijadikan peraturan yang tetap untuk kemajuan rohani dari rakyatnya.⁶ Sedangkan dalam Islam, tuntutan akhlak harus bersumber kepada syari'at Islam.

Hal tersebut yang kemudian melandasi Prawoto untuk memperjuangkan kembali Piagam Jakarta sebagai sebuah entitas negara di Indonesia. Bahkan Prawoto mengutip pernyataan Soekarno dalam sidang PPKI yang kemudian digunakan sebagai ruang perjuangannya yaitu:

“Tuan-tuan tentu mengerti bahwa ini adalah sekedar Undang-undang Dasar Sementara, Undang-undang Dasar Kilat, bahwa boleh dikatakan pula, inilah revolutiegrondwet. Nanti kita membuat Undang-undang Dasar yang lebih sempurna dan lengkap. Harap diingat-ingat benar-benar oleh tuan-tuan, agar supaya kita ini hari bisa selesai dengan Undang-undang Dasar ini”.⁷

Prawoto Mangkusasmito sendiri adalah putra sulung seorang lurah dari keluarga santri yang taat beragama yaitu Mangkusasmito.⁸ Prawoto pada tanggal 4 Januari 1910 di Desa Tirto Grabak, Magelang, Jawa Tengah. Prawoto mempelajari Islam sejak kecil dengan belajar di Surau di sekitar rumah. Namun, pendidikan agamanya tidak dilanjutkan ketika masuk sekolah dasar dan hidup di lingkungan perkotaan. Prawoto bersekolah di *Hollandsch Indlansche School* (HIS) Temanggung pada tahun 1917. Ketika bersekolah di HIS inilah Prawoto pertama kali bertemu dengan Mohammad Roem yang bersekolah di tempat yang sama. Setelah tamat HIS, Prawoto

⁶ *Ibid.*, hal 301-302

⁷ *Ibid.*, hal 309. Lihat juga Adnan Buyung Nasution. *Aspirasi Pemerintahan Konstitusional di Indonesia : Studi Sosio Legal atas Konstituante 1956-1959*. (Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 2001), hal 84

⁸ *Harian Berkala Umum "Adil"*, 31 Juli 1970

melanjutkan studinya ke *Meer Uitgebreid Lager Onderwijs* (MULO) di Magelang, dan bertemu dengan Yusuf Wibisono untuk pertama kalinya karena bersekolah di tempat yang sama. Prawoto kemudian memasuki *Algemeene Middelbare School Afdeling B* (AMS-B) di Yogyakarta dan tamat pada tahun 1931.⁹

Ketika bersekolah di AMS-B Yogyakarta, Prawoto terlibat dalam *Jong Java*, yang kemudian hari berubah menjadi “Indonesia Muda”. Bersamaan dengan itu pula Prawoto ikut terlibat aktif dalam *Jong Islamieten Bond* (JIB) yang merupakan pecahan dari *Jong Java* dan mayoritas anggotanya terdiri atas pelajar-pelajar Bumiputera dari sekolah Belanda. *Jong Islamieten Bond* (JIB) sendiri mendapat pengaruh intelektual yang cukup mendalam dari Haji Agus Salim, seorang tokoh intelektual Islam sekaligus tokoh Sarekat Islam terkemuka setelah H.O.S.Cokroaminoto.¹⁰ Prawoto kemudian melanjutkan pendidikannya pada tahun 1935 di *Rechts Hoogeschool* (RHS) di Jakarta dan terlibat dalam *Studenten Islam Studieclub* (SIS). Selama terlibat dalam SIS, Prawoto pernah menjadi redaktur *Mosleme Revuelle*, yang merupakan majalah perkumpulan SIS hingga menjabat sebagai Ketua SIS yang terakhir (Desember 1940 - Maret 1942).

Pada tahun 1940, Prawoto mulai terlibat dalam politik praktis ketika bergabung dengan Partai Islam Indonesia (PII) yang dipimpin oleh Sukiman Wirjoosandjojo. Di Dalam Kongres Pertama PII, Prawoto terpilih menjadi komisaris untuk mewakili Jawa Barat dan berkedudukan di Jakarta. Keterlibatan Prawoto di PII tidaklah

⁹ Suara Partai Masyumi No. 5 (1951), *Memperkenalkan Prawoto Mangkusasmito*

¹⁰ Anwar Haryono dkk. *M.Natsir: Sumbangan dan Pemikirannya untuk Indonesia*, (Jakarta: Media Dakwah, 1995), hal. 119

berlangsung lama, karena pada tahun 1942 Jepang menduduki Indonesia. Pemerintah Militer Jepang melarang berdirinya organisasi-organisasi pada masa Pergerakan Nasional, kecuali Majelis Islam A'la Indonesia (MIAI). Kemudian Prawoto bersama dengan Mohammad Roem, Yusuf Wibisono, Anwar Cokroaminoto dan Zainul Arifin membentuk Barisan Hizbullah di Jakarta. Pada tahun 1942, Prawoto turut pula mendirikan Perwabi (Persatuan Warung Bangsa Indonesia). Prawoto mulai mengenalkan Mohammad Natsir ketika terlibat dalam Sekolah Tinggi Islam Jakarta. Ketika itu Natsir menjadi Sekretaris I dan Prawoto menjadi Sekretaris II dalam kepengurusan Sekolah Tinggi Islam Jakarta.

Setelah Indonesia merdeka, Prawoto terlibat dalam Kongres Umat Islam di Yogyakarta pada tanggal 7 November 1945 yang melahirkan Partai Masyumi. Partai Masyumi didirikan sebagai sarana memperjuangkan kembali Islam sebagai entitas pribadi, masyarakat, bangsa dan negara Indonesia. Sejak awal berdirinya Partai Masyumi, Prawoto telah menjadi pemimpin pusat Partai Masyumi. Pada Mukhtamar VII tahun 1954 di Surabaya Prawoto terpilih menjadi sekretaris umum, di Mukhtamar VIII tahun 1956 di Bandung terpilih menjadi wakil ketua I, dan terakhir pada Mukhtamar IX 1959 di Yogyakarta Prawoto menjadi Ketua Umum Pimpinan Pusat Partai Masyumi.¹¹

Selain itu, Prawoto juga terlibat dalam lembaga-lembaga negara. Prawoto pernah menjadi anggota Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP) pada tahun 1946. Bahkan ketika terjadi Agresi Militer Belanda II tahun 1948 yang menduduki Yogyakarta

¹¹ S.U.Bajasut. *Op.Cit.*, hal 5

sebagai ibukota. Prawoto terlibat dalam perjuangan gerilya bersama dengan R. Panji Suroso, I.J. Kasimo, dan Kasman Singodimedjo, dan menjadi anggota Komisariat Pemerintah Darurat Republik Indonesia (PDRI) untuk pulau Jawa. Upaya Belanda untuk menguasai kembali Indonesia berakhir dengan adanya Konferensi Meja Bundar (KMB) pada tahun 1949 di Den Haag. Berdasarkan Konferensi Meja Bundar (KMB), Belanda akhirnya mengakui kedaulatan Indonesia sebagai sebuah negara merdeka yang berdaulat. Pengakuan Belanda terhadap kedaulatan Indonesia tersebut, mengharuskan Indonesia berbentuk negara serikat dengan nama Republik Indonesia Serikat (RIS). Pada masa Indonesia berbentuk Republik Indonesia Serikat (RIS), Prawoto terpilih menjadi Ketua Badan Pekerja KNIP (BP-KNIP).

Pada tahun 1950 akhirnya RIS dibubarkan dan Indonesia kembali ke dalam bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Pada masa ini, Prawoto menjadi penasihat delegasi Indonesia yang pertama untuk Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Kemudian menjadi wakil ketua panitia negara untuk meninjau kembali hasil-hasil KMB. Selain itu, Prawoto menjadi anggota Dewan Perwakilan Rakyat Sementara Republik Indonesia (DPRS-RI) dan memimpin Fraksi Masyumi dalam lembaga tersebut.¹² Selanjutnya pada tahun 1952, Prawoto memimpin delegasi Parlementer ke Pakistan hingga kemudian menjadi wakil perdana menteri dalam Kabinet Wilopo (2 April – 31 Juli 1953).

Setelah menjadi wakil perdana menteri, Prawoto diangkat menjadi Wakil Ketua Panitia Pemilu. Pemilihan umum (pemilu) berhasil dilangsungkan untuk pertama kali

¹² *Ibid.*, hal 4

tahun 1955 pada masa Kabinet Burhanudin Harahap. Pemilu 1955 berhasil memilih anggota DPR dan Badan Konstituante. Di dalam Badan Konstituante, Prawoto terpilih menjadi wakil ketua I sampai lembaga tertinggi hasil pemilihan umum ini dibubarkan dengan keluarnya Dekrit Presiden 5 Juli 1959.

Dekrit Presiden 5 Juli 1959 mengarahkan Indonesia ke masa Demokrasi Terpimpin. Demokrasi Terpimpin sendiri merupakan masa yang suram bagi Prawoto dan Partai Masyumi. Pada tanggal 17 Agustus 1960, Presiden Soekarno mengeluarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia (Kepres) No.200/1960 yang menyatakan bahwa Partai Masyumi harus dibubarkan dalam waktu 30 hari sejak tanggal 17 Agustus 1960. Apabila tidak dibubarkan, Partai Masyumi akan dianggap sebagai partai terlarang. Landasan munculnya Kepres No.200/1960 ini dikarenakan keterlibatan beberapa tokoh Partai Masyumi dalam perjuangan Pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia (PRRI) dan pemerintah meminta kepada Prawoto selaku Ketua Umum Partai Masyumi ketika itu untuk mengutuk tokoh-tokoh Partai Masyumi yang terlibat dalam PRRI yaitu Mohammad Natsir, Burhanuddin Harahap dan Syafruddin Prawiranegara. Prawoto tidak menuruti permintaan pemerintah tersebut karena Prawoto berpendirian bahwa Partai Masyumi adalah salah satu partai politik yang tidak terlibat dalam perjuangan PRRI sehingga Partai Masyumi tidak perlu mengutuk seperti yang diminta oleh pemerintah. Hingga pada akhirnya dua tahun setelah Partai Masyumi dibubarkan, para tokoh-tokoh Partai Masyumi ditangkap dan salah satunya adalah Prawoto Mangkusasmito.

Prawoto ditangkap pada bulan Januari 1962 dan dipenjarakan di Rumah Tahanan Militer (RTM) Jakarta dan Madiun bersama-sama dengan tokoh politik lainnya yaitu Mohammad Roem, Yunan Nasution, KH.M.Isa Anshary, Sutan Syahrir, Subadio Sastrosatomo, Anak Agung Gede Agung, Sultan Hamid, Muchtar Lubis dan lain-lain. Kemudian terakhir dipindahkan ke Wisma Keagungan, Jakarta bersama-sama Mohammad Natsir, Syafrudin Prawiranegara, dan Burhanudin Harahap hingga dibebaskan oleh pemerintah Orde Baru pada tanggal 17 Mei 1966.¹³

Setelah keluar dari penjara pada masa Orde Baru, Prawoto berupaya untuk melakukan rehabilitasi Partai Masyumi dan berusaha memperjuangkan agar Partai Masyumi mendapat izin berdiri kembali sebagai partai politik di Indonesia, tetapi usahanya gagal. Bahkan Prawoto dilarang untuk terlibat dalam aktivitas politik praktis. Akhirnya Prawoto mengalihkan perjuangannya ke basis perjuangan sosial kemasyarakatan dengan mendirikan Dewan Dakwah Islam Indonesia (DDII).

Selain dalam aspek perjuangan pergerakan politik praktis, Prawoto juga terlibat dalam aktivitas perjuangan pergerakan sosial. Bagi Prawoto, aktivitas hidup ini semata-mata dalam rangka beribadah dan berdakwah untuk meraih keridhaan Ilahi. Berkecimpung di lapangan politik, bagi Prawoto merupakan bagian dari ibadah dan dakwah. Maka ketika tidak lagi mendapat kesempatan untuk berkiprah di lapangan politik, jalan ibadah, dan dakwah dalam bentuk lain masih terbuka sangat lebar. Diantaranya adalah menjadi salah satu pendiri dan pengurus Dewan Dakwah Islam Indonesia (DDII).

¹³ *ibid.*

Dewan Dakwah Islam Indonesia (DDII) didirikan 26 Februari 1967, atas undangan pengurus masjid Al-Munawarah, Kampung Bali, Tanah Abang, Jakarta Pusat. Para tokoh Islam berkumpul untuk bermusyawarah, membahas, meneliti, dan menilai beberapa masalah, terutama yang berhubungan dengan permasalahan dan usaha pembangunan umat. Salah satu hasil dari perundingan tersebut adalah disepakatinya pembentukan DDII yang sekarang bertempat di bekas kantor Partai Masyumi Jalan Kramat Raya No.45. Selain terlibat dalam DDII, Prawoto juga terlibat dalam Serikat Tani Islam Indonesia (STII) dan Kongres Buruh Islam Merdeka (KBIM) sebagai pembina. Serikat Tani Islam Indonesia (STII) dan KBIM pada awalnya adalah organisasi sayap dari Partai Masyumi tetapi dalam perkembangannya sayap organisasi ini melepaskan diri dari Masyumi.

Sebenarnya sebelum dipenjara, Prawoto pernah terlibat dalam perjuangan sosial kemasyarakatan dengan mendirikan Yayasan Asrama Pelajar Islam (YAPI) pada tanggal 26 Mei 1952 bersama-sama dengan Yusuf Wibisono, Jusdi Ghazali, Mohammad Roem, Abdul Kadir, Jamilus Nurut, Wartomo, Sindian Djayadiningrat, Hariry Hadi, Ismael Hassan. Di dalam Yayasan Asrama Pelajar Islam, Prawoto menjadi ketua umum sampai tahun 1962. Yayasan Asrama Pelajar Islam mendirikan sebuah Asrama Mahasiswa Islam Sunan Gunung Jati di Jalan Bunga No.7 Jatinegara, Jakarta Timur, dan selanjutnya atas bantuan dari berbagai pihak didirikan pula Asrama Mahasiswa Islam Sunan Giri di Jalan Sunan Giri No.1 Rawamangun. Pembangunan asrama dimaksudkan untuk memberikan tempat tinggal bagi para

aktivis serta sebagai tempat pengkaderan umat Islam, sebagai calon pemimpin umat dan bangsa.¹⁴

Berdasarkan deskripsi singkat diatas, maka peneliti berupaya untuk merekonstruksi perjuangan Prawoto Mangkusasmito untuk kembali menjadikan Islam sebagai landasan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara di Indonesia dari awal kemerdekaan hingga akhir hayatnya (1945-1970). Ketertarikan peneliti terhadap sosok Prawoto Mangkusamito tidak lain karena Prawoto salah satu Ketua Umum Partai Masyumi selain Sukiman dan Natsir. Selain itu, Prawoto adalah Ketua Umum Partai Masyumi terakhir yang tentunya memikul beban perjuangan yang berat setelah beberapa tokoh-tokohnya terlibat dalam PRRI dan juga harus berhadapan dengan rezim Soekarno pada masa Demokrasi Terpimpin yang cenderung otoriter dan represif. Di dalam hal ini, peneliti mencoba mengutip tulisan Taufik Abdullah "*Manusia Dalam Sejarah: Sebuah Pengantar*" dalam buku "*Manusia Dalam kemelut Sejarah*" yaitu:

"Bukanlah besar atau kecilnya peranan yang menjadi ukuran, dan tidaklah pahlawan atau bukannya mereka yang menjadi pegangan. Mereka dibicarakan karena pada mereka tampak dengan jelas pergumulan dengan lingkungan diri dan dialog mereka dengan sejarah. Dengan mencoba mengerti aspek-aspek tersebut dalam kehidupan mereka kita akan lebih mudah mendalami dinamika-dinamika sejarah Indonesia. Apalagi hidup dan perjuangan mereka tak terpisahkan dari perkembangan dan pergolakan Indonesia".¹⁵

Memang disadari oleh peneliti, penelitian tentang tokoh-tokoh Islam sudah cukup banyak terutama tokoh-tokoh Partai Masyumi. Begitupun dengan Prawoto Mangkusasmito ada beberapa peneliti yang sudah mengangkat perjuangan Prawoto

¹⁴ http://sejarah.kompasiana.com/2010/08/23/prawoto-mangkusasmito/diakses_pada_tanggal_17_Juni_2011_pukul_16.58_WIB

¹⁵ Taufik Abdullah, dkk. *Manusia Dalam Kemelut Sejarah*. (Jakarta: LP3ES, 1994), hal 11-12

Mangkusasmito jadi bahan penelitian yaitu skripsi oleh Yunadi Ramlan "Perjuangan Politik Prawoto Mangkusasmito Dalam Menegakkan Demokrasi: 1955-1970" di Fakultas Sastra, UI dan skripsi Rizal Zulkarnain tentang "Pemikiran dan Perjuangan Politik Prawoto Mangkusasmito 1956-1960" di FISIP Universitas Muhammadiyah Jakarta. Di dalam hal ini, peneliti menilai skripsi Yunadi Ramlan dan Rizal Zulkarnain lebih kepada perjuangan politik Prawoto Mangkusasmito pada masa Demokraasi Liberal. Sedangkan dalam penelitian saat ini peneliti hendak merekonstruksi perjuangan Prawoto Mangkusasmito dari awal kemerdekaan hingga akhir hayatnya (1945-1970).

B. Pembatasan dan Perumusan Masalah

1. Pembatasan Masalah

Penelitian yang peneliti lakukan berupa biografi politik Prawoto Mangkusasmito. Biografi sendiri terdiri atas dua bentuk yaitu: portrayal (portrait) dan scientific (ilmiah). Menurut Kuntowijoyo, biografi politik termasuk ke dalam portrayal (portrait). Penulisan biografi portrayal (portrait) dilakukan hanya untuk mencoba memahami. Menurut Wilhelm Dilthey, memahami berarti mencoba mengerti makna dalam yang subjektif dari tokohnya sendiri sebagaimana tokoh tersebut menafsirkan hidupnya. Sedangkan menurut Max Webber, memahami itu ada dua, yaitu memahami makna dalam yang subjektif dan memahami konteks yang lebih luas. Jadi, menurut Kuntowijoyo memahami itu berarti memahami sebagaimana tokoh memberi makna perbuatannya dan juga memahami konteks hidup, lingkungan sosial-budaya dan

konteks sejarah yang bersangkutan.¹⁶ Sehingga penelitian yang peneliti lakukan mengenai Prawoto mangkusasmito adalah untuk mencoba memahami sosok Prawoto dalam memberi makna dalam perbuatannya dan juga konteks hidup, lingkungan sosial-budaya dan konteks sejarah yang dilalui oleh Prawoto dalam perjuangan politik di Indonesia dengan pembatasan waktu dari masa awal kemerdekaan hingga akhir hayatnya yaitu tahun 1945 hingga tahun 1970.

2. Perumusan Masalah

Berdasarkan dasar pemikiran dan pembatasan masalah diatas, maka rumusan masalah penelitian ini terdiri atas:

1. Bagaimana riwayat hidup Prawoto Mangkusasmito?
2. Bagaimana perjuangan politik Prawoto Mangkusasmito melalui Partai Masyumi (1945-1960) ?
3. Bagaimana perjuangan politik Prawoto Mangkusasmito dalam dua orde politik hingga akhir hayatnya (1960-1970)?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan merekonstruksi sosok Prawoto Mangkusasmito dalam memberi makna dalam perbuatannya dan juga konteks hidup, lingkungan sosial-

¹⁶ Kuntowijoyo. *Metodologi Sejarah*. (Yogyakarta: Tiara Wacana, 2003), hal 208-209. Lihat juga Taufik Abdullah. *“Manusia Dalam kemelut Sejarh; Sebuah Pengantar”*, dalam *Manusia Dalam Kemelut Sejarah*. (Jakarta: LP3ES, 1994), hal 4-5

budaya dan konteks sejarah yang dilalui oleh Prawoto dalam perjuangan politik di Indonesia dari awal kemerdekaan hingga akhir hayatnya (1945-1970).

2. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini berguna untuk menambah referensi mengenai biografi tokoh-tokoh pejuang Islam di Indonesia, khususnya tokoh Prawoto Mangkusasmito, sekaligus sebagai referensi kajian sejarah politik di Indonesia. Sehingga diharapkan dengan hadirnya biografi politik Prawoto Mangkusasmito dapat memberikan gambaran tentang kepribadian Prawoto Mangkusasmito, kekuatan sosial yang mendukung, lukisan sejarah zamannya dan keberuntungan atau kesempatan yang datang menghampiri Prawoto dalam perjuangannya.¹⁷

Menurut Kuntowijoyo, biografi atau catatan hidup meskipun berskala kecil tetapi menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam mosaik sejarah yang lebih besar. Hal ini disebabkan dengan biografi dapat dipahami para pelaku sejarah, zaman yang menjadi latar belakang biografi dan lingkungan sosial-politiknya.¹⁸ Bahkan menurut Taufik Abdullah, kita akan lebih mudah mendalami dinamika-dinamika sejarah Indonesia dengan mencoba mengerti aspek-aspek tersebut dalam kehidupan pelaku sejarah karena pada pelaku sejarah tampak dengan jelas pergumulan dengan lingkungan diri dan dialog mereka dengan sejarah.¹⁹ Apalagi hidup dan perjuangan pelaku sejarah, dalam hal ini Prawoto Mangkusasmito, tidak bisa dipisahkan dengan perkembangan dan pergolakan politik di Indonesia.

¹⁷ *Ibid.*, hal 206-208

¹⁸ *Ibid.*, hal 203

¹⁹ Taufik Abdullah, dkk. *Loc.Cit.*

D. Metode dan Bahan Sumber

1. Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian sejarah. Penelitian ini disajikan menggunakan model deskriptif naratif.²⁰ Penggunaan model deskriptif naratif dalam penyajian skripsi yang digunakan oleh peneliti disebabkan penelitian ini berupa biografi politik yang berupa *portrayal* (portrait) yang hanya mencoba untuk memahami sosok Prawoto dalam memberi makna akan perbuatannya dan juga konteks hidup yang bersangkutan.²¹

Sesuai dengan kaidah-kaidah penelitian sejarah, maka penelitian ini menempuh beberapa langkah atau tahapan, sebagai berikut :

Tahap pertama, pemilihan topik, sebelum melakukan tahapan mengumpulkan sumber terlebih dahulu harus menentukan topik permasalahannya sebagai orientasi dalam fokus dan perumusan masalah. Tahap kedua, adalah *heuristik* (pengumpulan sumber) yaitu pengumpulan sumber sejarah dilakukan melalui wawancara dan kajian pustaka yang sesuai dengan topik penelitian. Data berupa kajian pustaka tersebut diperoleh dari Perpustakaan Nasional, Arsip Nasional, Arsip Pribadi Keluarga Besar Prawoto Mangkusasmito, Perpustakaan dan Arsip Dewan Dakwah Islam Indonesia, Arsip Yayasan Asrama Pelajar Islam, Perpustakaan Universitas Negeri Jakarta, Perpustakaan Umum Daerah sedangkan data-data berupa wawancara diperoleh dari Keluarga Besar Prawoto Mangkusasmito dan orang-orang yang mengenalnya secara

²⁰ Sartono Kartodirdjo, *Pendekatan Ilmu Sejarah Dalam Metodologi Sejarah*, (Jakarta : Gramedia, 1993), hal. 9.

²¹ Kuntowijoyo. *Loc.Cit.* Lihat juga Taufik Abdullah. "*Manusia Dalam Sejarah: Sebuah Pengantar*", dalam *Manusia Dalam Kemelut Sejarah*. (Jakarta:LP3ES, 1994), hal 4-5

dekat. Tahapan ketiga, adalah kritik, yaitu penulis melakukan kritik ekstern dengan melakukan pengujian terhadap otentisitas (keaslian) sumber dan melakukan kritik intern dengan melakukan pengujian terkait keakuratan materi sumber yang telah didapatkan. Tahapan keempat adalah interpretasi. Interpretasi adalah penafsiran sumber-sumber sejarah yang didapat dengan menguraikan sumber-sumber tersebut setelah sebelumnya dianalisis untuk memperoleh fakta-fakta. Tahapan yang terakhir adalah *historiografi* (penulisan sejarah) yang dilakukan dengan sintesa terhadap fakta-fakta sehingga rangkaian fakta-fakta secara kronologis tersebut bisa menjadi kisah sejarah.²²

2. Bahan Sumber

Sumber yang digunakan dalam penelitian ini adalah sumber primer berupa arsip-arsip yang berkaitan dengan Prawoto Mangkusasmito yang dikumpulkan dalam buku “Alam Fikiran dan Djedjak Perdjungan Prawoto Mangkusasmito” dan buku “Surat-surat dari Pendjara Prawoto Mangkusasmito Kepada Putri(A)nja”. Menurut Sartono Kartodirdjo, sumber primer yang digunakan oleh peneliti termasuk ke dalam data *verbaal*. Kumpulan data *verbaal* yang berupa tulisan disebut dokumen.²³

Sedangkan sumber sekunder berupa sumber tertulis dari surat kabar dan buku-buku serta sumber lisan dari hasil wawancara dengan orang terdekat dari Prawoto Mangkusasmito yaitu Nuruddin Achmad (Putera Prawoto), Ramlan Mardjonet (Mantan Asisten Prawoto), dan Hardi M. Arifin (Pihak yang sering ditugaskan

²² Kuntowijoyo. *Pengantar Ilmu Sejarah*. (Yogyakarta : Bentang, 1999), hal 91-108. Lihat juga Sartono Kartodirdjo. *Pemikiran dan Perkembangan Historiografi Indonesia: Suatu Alternatif*. (Jakarta: Gramedia, 1982), hal 96-121

²³ Sartono Kartodirdjo. *Pemikiran dan Perkembangan Historiografi Indonesia: Suatu Alternatif*. (Jakarta: Gramedia, 1982), hal 98

menjenguk tokoh-tokoh Masyumi selama di penjara). Surat kabar yang digunakan oleh peneliti diklasifikasikan sebagai sumber sekunder karena merupakan surat kabar yang penerbitannya setelah Prawoto Mangkusasmito meninggal. Menurut Sartono Kartodirdjo, surat kabar sebagai sumber informasi tidak hanya menunjukkan fakta, tetapi juga opini, interpretasi dan pikiran-pikiran spekulatif. Pada umumnya penggunaan fakta-fakta dalam surat kabar sering kurang teliti karena singkatnya waktu yang tersedia untuk mengolah informasi dan menyelami persoalan dan seluruh latar belakangnya.²⁴

²⁴ *Ibid.*, hal 108